

Urgensi Manajemen Pendidikan dalam Birokrasi dan Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia

Marco Antonio

Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur

Arifin Yusli

Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur

Roby Priambodo

Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur

Email: mark0antn1@gmail.com

Abstrak. Jurnal ini ditulis dengan memperhatikan kebutuhan kemampuan manajemen yang baik dalam perumusan sistem pendidikan yang baik dan bagaimana sistem tersebut berjalan sebagai sebuah suatu birokrasi. Mengingat betapa pentingnya kemampuan manajemen yang baik untuk menciptakan sistem yang baik pula, maka jurnal ini dibuat dengan melihat realitas yang ada tentang bagaimana keadaan sistem itu sendiri. Manajemen yang baik akan menciptakan birokrasi pendidikan yang baik, dan birokrasi yang baik akan menghasilkan pengelolaan sistem pendidikan yang baik pula, dan hal ini akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Pada jurnal ini, kami berusaha membuka jalan pikir pembaca tentang urgensi manajemen yang baik dalam birokrasi pendidikan dan pendidikan sistem.

Kata kunci: birokrasi pendidikan, mutu pendidikan, pendidikan sistem

Abstract. This journal is written by taking into account the need for good management skills in the formulation of a good education system and how the system works as a bureaucracy. Given how important good management skills are to create a good system, this journal is made by looking at the existing reality of how the system itself is. Good management will create a good education bureaucracy, and a good bureaucracy will also produce a good education management system, and this will have an impact on improving the quality of education. In this journal, we try to open the reader's way of thinking about the urgency of good management in the education bureaucracy and the education system.

Keywords: education bureaucracy, quality of education, education system

PENDAHULUAN

Kemampuan manajemen yang baik sangat dibutuhkan hampir di semua sektor pekerjaan pada saat ini. Kemampuan manajemen yang baik akan membantu tujuan dari suatu organisasi atau lembaga dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Manajemen yang baik juga akan memberikan kesempatan bagi organisasi atau lembaga untuk dapat menjadi lebih unggul dan bisa melampaui target capaian yang telah ditentukan sebelumnya menjadi lebih baik. Dengan memiliki SDM yang menguasai kemampuan manajemen yang baik, maka organisasi atau lembaga akan terhindar dari masalah-masalah yang dapat terjadi karena kemampuan manajemen yang buruk seperti gagal tercapainya suatu tujuan.

Terkait dengan kemampuan manajemen yang baik, seorang penulis asal Amerika Serikat yakni James Covey pernah berkata bahwa “Manajemen adalah keefektifan dalam menaiki tangga kesuksesan; Kepemimpinan menentukan apakah tangga tersebut bersandar pada tembok yang kokoh.” Pada kalimat tersebut tergambar jelas bahwa kemampuan manajemen yang baik sangat berpengaruh pada tercapainya kesuksesan tujuan. Namun hal ini harus dilandaskan juga pada kemampuan setiap individu di dalamnya terkait bagaimana berjalannya polarisasi manajemen ini berjalan

Pada dasarnya, birokrasi dalam pendidikan menekankan bagaimana polarisasi setiap fungsi bekerja secara maksimal demi memberi kemudahan bagi pelayanan dan pelaksanaan sistem pendidikan demi meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini, sistem pendidikan dirancang sedemikian rupa dan dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan aturan yang ada untuk memberikan hasil yang maksimal dalam hal pelayanan pendidikan. Jika birokrasi pendidikan dapat dimaksimalkan, maka hal ini akan berdampak pada mutu pendidikan yang semakin meningkat dan SDM yang dihasilkan juga akan semakin baik dalam hal kualitas.

Birokrasi dalam pendidikan diatur jelas pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 164/P/2021 yang berisikan panduan terkait reformasi birokrasi pendidikan di Indonesia. Kemendikbudristek telah mengatur jelas bagaimana sistem birokrasi dalam pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan pendidikan yang juga telah diatur. Jika dilihat secara baik, maka peran manajemen sangat besar dalam birokrasi pendidikan dalam hal perancangan dan pelaksanaan sistem birokrasi pendidikan, sehingga setiap komponen yang ada memainkan perannya masing-masing dalam membantu tercapainya tujuan sistem pendidikan yang ada.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif melalui model studi pustaka dari data yang didapatkan dan dikaji kembali secara mendalam sehingga menghasilkan pembahasan yang baik secara subjektif terkait tema yang diambil. Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

PEMBAHASAN

Manajemen dalam pendidikan sudah diatur dengan jelas pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia, tepatnya pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah menyatukan 3 undang-undang, yakni UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada UU No. 20 Tahun 2003 tersebut kemudian ketiga dari UU sebelumnya disederhanakan menjadi satu UU demi menjaga efektivitas pelaksanaan sistem pendidikan.

Secara garis besar, tergambar dengan jelas bagaimana sistem pendidikan memainkan perannya dalam mengatur perancangan dan pelaksanaan pendidikan secara manajerial. Setiap pasal yang diatur dalam UU tersebut dirancang sesuai dengan target capaian dan telah dikaji serta dikoordinasikan dengan berbagai pihak secara birokratis sehingga dapat dirumuskan. Hal

ini bergantung pada bagaimana birokrasi itu dirancang dan dilaksanakan secara manajerial. Manajemen sangat mempengaruhi birokrasi dalam pendidikan di Indonesia. Manajemen mengatur bagaimana birokrasi pendidikan berjalan secara birokratis dalam sistem pendidikan.

Menurut Weber yang dikutip oleh Zaidan Nawawi, pengertian birokrasi pada hakekatnya adalah struktur yang teratur dan teratur dengan hubungan kerja berjenjang yang mengikuti proses. Model birokrasi yang dikemukakan oleh Weber membagi pekerjaan secara metodis. Albrow mengajukan saran berikut mengacu pada teori birokrasi Weber:

1. Adanya struktur hirarkis, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi;
2. adanya beberapa jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda;
3. Adanya aturan, ketentuan, dan standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan perilaku anggotanya;
4. Adanya aturan, regulasi, dan standar formal yang mengatur praktik perekrutan organisasi.

Untuk menjaga kestabilan birokrasi pendidikan yang ada, maka perlu adanya pengelolaan manajerial yang baik dari dalam sistem pendidikan itu sendiri. Ketika para komponen pelaksana sistem pendidikan melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, maka mereka akan mengacu pada komponen fundamental manajemen pendidikan, yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen tersebut. Ada tugas manajemen yang terkait langsung dengan manajemen. Fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengatur merupakan empat fungsi manajemen menurut George R. Terry.

Luther Gullick menegaskan bahwa ada tujuh fungsi manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan pelaporan objektif. (penganggaran). Perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengendalian adalah empat fungsi manajerial, menurut Hersey dan Blanchard mengatakan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi motivasi, dan fungsi pengaturan adalah empat fungsi manajemen. Dengan mengenal fungsi manajemen secara mendalam, maka pengelolaan manajemen tersebut dapat secara mudah diimplementasikan ke dalam sistem birokrasi pendidikan yang ada.

KESIMPULAN

Dalam menjaga standarisasi kualitas pendidikan dan meningkatkan serta mengembangkan efektivitas pengelolaan pendidikan, perlu adanya kemampuan manajemen yang baik dalam merumuskan hubungan birokratis antara seluruh komponen sistem pendidikan yang ada. Perlu adanya kajian dan pengembangan yang tepat dan terarah terkait apa tujuan pendidikan tersebut dan bagaimana pengelolaan sistem pendidikan tersebut dalam usaha mencapai peningkatan mutu pendidikan. Dengan memiliki kemampuan manajemen yang baik,

maka seluruh komponen akan dapat bekerja sama dalam hal birokrasi untuk kemajuan sistem pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Munjani, “*Strategi Reformasi Birokrasi Pendidikan Dan Kebijakan Kemendikbud*”, Halaman 11954-11962 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia.

Nurkolis, “*Potret Birokrasi Pendidikan di Indonesia*”, JMP Volume 2 No. 1, PPs IKIP PGRI Semarang, Jl. Lingga No. 6 Dr. Cipto 50125, April 2013

Fatmawati, Erma. “*Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif: Peran Birokrasi Dan Partisipasi Masyarakat*”, JIEMAN: Journal of Islamic Education Management Vol. 1, No. 1, Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Desember 2019